

PERSEPSI CALON WAJIB PAJAK DAN WAJIB PAJAK TERHADAP ETIKA PENGGELAPAN PAJAK DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Devi Cyntia Amelia Rahmayanti¹, Amir Hidayatulloh, S.E., M.Sc.²

¹) Universitas Ahmad Dahlan, ²) Dosen Universitas Ahmad Dahlan

Email: ¹)deviamelia092@gmail.com

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui persepsi mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah perpajakan, mahasiswa yang belum mengambil mata kuliah perpajakan, dan wajib pajak orang pribadi terhadap etika penggelapan pajak, (2) mengetahui apakah ada perbedaan persepsi antara mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah perpajakan, mahasiswa yang belum mengambil mata kuliah perpajakan, dan wajib pajak orang pribadi terhadap etika penggelapan pajak.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi dan calon wajib pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 660 responden. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah uji *Kruskall Wallis Test*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah perpajakan, mahasiswa yang belum mengambil mata kuliah perpajakan, dan wajib pajak orang pribadi terhadap etika penggelapan pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi $0,509 > 0,05$.

Kata kunci: *persepsi, etika penggelapan pajak, calon wajib pajak, wajib pajak*

ABSTRACT

This research aims to: (1) determine the perceptions of students who have taken taxation courses, students who have not taken taxation courses, and taxpayers on the ethics of tax evasion, (2) determine whether there are different in the perception between students who have taken taxation courses, students who have not taken taxation courses, and taxpayers on the ethics of tax evasion.

The population in this research are all taxpayers and future taxpayers in Daerah Istimewa Yogyakarta. The sample in this research were 660 respondents. The data analysis technique used to test the hypothesis is kruskall wallis test.

The results shows that there were no different in the perceptioint between students who have taken taxation courses, students who have not taken taxation courses, and taxpayers on the ethics of tax evasion. This is evidenced by the significance value of $0,509 > 0,05$.

Keywords: *perception, ethics of tax evasion, future taxpayers, taxpayers*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Menurut Soemitro (1992) dalam Suminarsasi (2011) pajak merupakan iuran wajib bagi seluruh rakyat yang dipungut oleh negara dan bersifat dapat dipaksakan serta tanpa adanya imbal balik secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara. Meskipun pajak bersifat wajib, namun sebagian wajib pajak menganggap bahwa membayar pajak merupakan suatu beban yang dapat mengurangi pendapatan wajib pajak itu sendiri (Mujiyati, Rohmawati, dan Ririn, 2018). Beberapa tahun yang lalu kasus penggelapan pajak menjadi isu yang sedang dibicarakan. Menurut Paramita dan Budiasih (2016) banyaknya kasus penggelapan pajak mengakibatkan masyarakat kehilangan rasa percaya terhadap fiskus maupun negara karena takut pajak yang mereka setorkan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga masyarakat enggan untuk membayar pajak.

Kasus penggelapan pajak yang terkenal di Indonesia adalah kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT Asian Agri Group (PT AAG). Penggelapan pajak yang dilakukan PT Asian Asri Group dilakukan dengan cara menggelembungkan biaya, transaksi ekspor dibuat rugi, dan hasil penjualan diperkecil (koran.tempo.co, 2007). Selain itu kasus penggelapan pajak yang tidak kalah terkenal di Indonesia adalah kasus Gayus Tambunan. Akibat banyaknya kasus penggelapan pajak di Indonesia, maka masyarakat menjadi enggan untuk membayar pajak. Penggelapan pajak di Indonesia merupakan persoalan nyata dengan modus yang semakin canggih, namun belum terjamah dan terantisipasi dengan efektif (kompas.com, 2013).

Menurut Mughal (2012) dalam Reskino, Rini, dan Novitasari (2014) menyatakan bahwa penggelapan pajak merupakan ketidakpatuhan wajib pajak yang secara sengaja melakukan pelanggaran hukum dengan cara melarikan diri dari pembayaran pajak yang merupakan kewajiban bagi wajib pajak untuk membayar pajak. Penyebab wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak biasanya dikarenakan pajak dipandang sebagai suatu beban yang akan mengurangi kemampuan ekonomis seseorang (Reskino *et al.*, 2014).

Tingkat penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak badan (perusahaan) (Ika, 2012). Ketidakpatuhan individu untuk melakukan tindakan penggelapan pajak dipengaruhi oleh niat individu itu sendiri. Sikap seseorang, pengaruh dari orang-orang sekitar, serta kontrol perilaku yang dipersepsikan mempengaruhi niat orang tersebut untuk melakukan penggelapan pajak atau tidak (Kurniawati dan Toly, 2014).

Beberapa penelitian sebelumnya yang juga meneliti persepsi mengenai etika penggelapan pajak, yaitu Abrahams dan Kristanto (2016) menemukan bahwa mayoritas responden tidak menyetujui bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang etis. Hal senada juga ditemukan oleh Prasetyo (2010) yang menunjukkan bahwa mayoritas wajib pajak yang diteliti tidak setuju dengan adanya penggelapan pajak. Penelitian yang lain juga dilakukan oleh Reskino *et al.*, (2014) menemukan bahwa tidak ada perbedaan antara persepsi mahasiswa akuntansi program S1 dan mahasiswa akuntansi program S2 mengenai etika penggelapan pajak. Penelitian lain juga dilakukan oleh Utami dan Widodo (2015) menunjukkan

bahwa ada persepsi yang berbeda dari mahasiswa akuntansi dan mahasiswa hukum mengenai etika penggelapan pajak. Inilah penyebab peneliti ingin mengkaji lebih jauh mengenai persepsi calon wajib pajak dan wajib pajak terhadap etika penggelapan pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang dilakukan oleh Abrahams dan Kristanto (2016) dengan meneliti persepsi calon wajib pajak dan wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu yaitu pada obyek penelitian dan teknik analisis data. Obyek penelitian terdahulu adalah wajib pajak orang pribadi dan mahasiswa program studi akuntansi dan manajemen yang sudah mengambil mata kuliah hukum pajak. Obyek penelitian sekarang adalah mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah perpajakan, mahasiswa yang belum mengambil mata kuliah perpajakan, dan wajib pajak orang pribadi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Alasan dipilihnya wajib pajak orang pribadi karena wajib pajak orang pribadi cenderung lebih banyak melakukan penggelapan pajak daripada wajib pajak badan (Ika, 2012). Adapun calon wajib pajak yang diteliti adalah mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah perpajakan dan mahasiswa yang belum mengambil mata kuliah perpajakan. Alasan dipilihnya calon wajib pajak yaitu mahasiswa kelak mereka akan menjadi pembayar pajak. Selain itu alasan dipilihnya mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah perpajakan karena mereka sudah paham tentang pajak dan aturan pajak dibandingkan dengan mahasiswa yang belum mengambil mata kuliah perpajakan. Adapun alasan dipilihnya mahasiswa yang belum mengambil mata kuliah perpajakan karena mereka belum paham tentang pajak dan

aturan pajak sehingga menyebabkan kesadaran mereka untuk membayar pajak rendah.

Adapun alasan dipilihnya Daerah Istimewa Yogyakarta karena kesadaran perpajakan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dinilai masih rendah (HarianJogja.com, 2017). Realisasi penerimaan pajak Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017 hanya mencapai Rp4,378 triliun dari total target penerimaan Rp5,167 triliun (HarianJogja.com, 2017). Hal ini juga dibuktikan dengan realisasi penerimaan pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018 tidak mencapai target. Penerimaan pajak Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018 hanya mencapai Rp4,7 triliun dari total target 2018 sebesar Rp5,4 triliun (krjogja.com, 2018). Selain itu penerimaan pajak perakhir September 2019 baru mencapai Rp3,4 triliun dari total target penerimaan sebesar Rp6,1 triliun (krjogja.com, 2019). Sehingga bisa disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017-2019 belum memenuhi target dan menyebabkan beberapa wajib pajak enggan untuk membayar pajak.

Teknik analisis data penelitian terdahulu hanya menggunakan teknik analisis statistik deskriptif, penelitian sekarang menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dan *One-Way ANOVA* jika data berdistribusi normal. Akan tetapi, jika data berdistribusi tidak normal maka menggunakan *Kruskal Wallis Test*.

Sebagai sumber penerimaan negara pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan negara. Terkait dengan adanya beberapa kasus penggelapan pajak maka pemberantasan terhadap kasus penggelapan pajak harus segera dituntaskan. Sehingga kesadaran masyarakat untuk membayar pajak

dapat meningkat. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Persepsi Calon Wajib Pajak dan Wajib Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak Di Daerah Istimewa Yogyakarta.”

KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Landasan Teori

a. Persepsi

Persepsi merupakan proses menanggapi dan menafsirkan sesuatu dalam hal ini yaitu penggelapan pajak berdasarkan ingatan, pemahaman, dan pengalaman masing-masing individu. Menurut Kurniawati dan Toly (2014) persepsi masyarakat mengenai penggelapan pajak adalah bagaimana masyarakat melihat dan memahami suatu peristiwa terkait penggelapan pajak dimana persepsi itu dipengaruhi oleh rangsangan fisik dan kecenderungan.

b. Etika

Etika berasal dari kata Yunani “*ethos*” yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Etika berkaitan dengan nilai-nilai hidup, tata cara dan aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain (Keraf, 1998). Menurut Suminarsasi (2011) etika pajak merupakan peraturan yang dimana orang per orang atau kelompok orang yang berada dalam ruang lingkup perpajakan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, apakah sudah benar atau tidak.

c. Penggelapan Pajak

Menurut Rahayu (2010) dalam Kurniawati dan Toly (2014) penggelapan pajak merupakan usaha aktif wajib pajak dalam meloloskan diri untuk tidak

membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan.

2. Pengembangan Hipotesis

Robbin (2002) dalam Utami dan Widodo (2015) menyatakan bahwa persepsi dipengaruhi oleh faktor pelaku persepsi, faktor objek, dan faktor situasi. Kebutuhan individu yang berbeda-beda, tekanan waktu, sikap orang lain, pengalaman, dan faktor situasi dapat mempengaruhi persepsi. Atas dasar itu, persepsi calon wajib pajak dan wajib pajak merupakan pandangan terhadap suatu peristiwa penggelapan pajak yang didasarkan oleh pengalaman individu yang berbeda-beda sehingga menimbulkan perbedaan persepsi antar individu.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Utami dan Widodo (2015) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi dan mahasiswa hukum terhadap etika penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono (2014) juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa ekonomi dan mahasiswa hukum mengenai etika penggelapan pajak. Serta penelitian yang dilakukan oleh Suwardi dan Abdurrasyid (2010) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara persepsi etis aparat pajak dan mahasiswa terhadap nilai etika di bidang perpajakan. Dari penjelasan tersebut dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H1 : Terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah perpajakan, mahasiswa yang belum mengambil mata kuliah perpajakan, dan wajib pajak orang pribadi terhadap etika penggelapan pajak.



Gambar 2.1
Sumber: Prasetyo (2010)
Rerangka Penelitian

METODE PENELITIAN

1. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Data

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi dan calon wajib pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang mempunyai NPWP, mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah perpajakan, dan mahasiswa yang belum mengambil mata kuliah perpajakan yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah sampel pada penelitian ini ditentukan dengan teknik pengambilan sampel *purposive sampling* dengan memperoleh 660 responden. Kuesioner yang disebar sebanyak 169 dan melalui *google form* sebanyak 491.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Dalam penelitian ini, sumber data yang didapatkan melalui kuesioner yang disebar kepada wajib pajak orang pribadi, mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah perpajakan, dan mahasiswa yang belum mengambil mata kuliah perpajakan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner disebarikan kepada wajib pajak orang pribadi, mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah perpajakan, dan mahasiswa yang belum mengambil mata kuliah perpajakan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel yang akan diukur dalam penelitian ini adalah persepsi terhadap etika penggelapan pajak, dalam hal ini adalah persepsi masing-masing kelompok responden yaitu wajib pajak dan calon wajib pajak (mahasiswa) terhadap etika penggelapan pajak. Pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 16 pernyataan yang diadopsi dari penelitian Abrahams dan Kristanto (2016). Pernyataan tersebut diukur dengan skala likert 5 poin dimana 1 (sangat tidak setuju) sampai 5 (sangat setuju).

5. Teknik Analisis Data

a. Uji Kualitas Data

1) Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur apakah instrumen penelitian (kuesioner) valid atau tidak. Untuk menguji validitas dilakukan dengan menggunakan program SPSS. Pengujian menggunakan taraf signifikansi 5%. Pernyataan atau indikator dikatakan valid jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ (Ghozali, 2018:51-52).

2) Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Untuk menguji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan program SPSS dengan uji statistik *Cronbach Alpha*. Indikator dikatakan reliabel jika nilai *cronbach alpha* lebih besar dari 0,70 (Nunnally, 1994) dalam (Ghozali, 2018:45-46).

b. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2018:161). Pengujian normalitas dapat dilihat dari nilai signifikansi. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka data berdistribusi normal (Priyatno, 2014:77-78).

c. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

d. Uji Hipotesis

Metode untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah menggunakan *One-Way ANOVA*. Menurut Priyatno (2014:180-186) *One-Way ANOVA* digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata tiga atau lebih kelompok data yang independen dan sampel berdistribusi normal. Dasar

pengambilan keputusan pada uji *One-Way ANOVA* adalah jika signifikansi $> 0,05$, maka H_0 diterima dan sebaliknya.

Sementara apabila sampel berdistribusi tidak normal maka digunakan uji *Kruskal Wallis Test*. Dasar pengambilan keputusan pada uji *Kruskal Wallis Test* adalah jika H hitung \leq *Chi Square* tabel atau signifikansi $> 0,05$, maka H_0 diterima dan sebaliknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu distribusi data (Sarjono dan Julianita, 2013). Uji statistik yang digunakan pada penelitian ini adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Data dikatatakan berdistribusi secara normal jika nilai signifikansi $> 0,05$. Adapun hasil uji statistik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas

		Etika Penggelapan Pajak
N		660
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	36,52
	Std. Deviation	11,848
Most Extreme Differences	Absolute	0,054
	Positive	0,053
	Negative	-0,054
Kolmogorov-Smirnov Z		1,395
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,041

Sumber: Data primer, diolah (2020)

Berdasarkan tabel 4.8, dapat diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. sebesar 0,041. Karena nilai signifikansi $0,041 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi tidak normal.

2) Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Adapun hasil rata-rata skor jawaban responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9 Hasil Rata-rata Skor Jawaban Responden

No	Wajib Pajak	Mahasiswa Sudah Mengambil Mata Kuliah Perpajakan	Mahasiswa Belum Mengambil Mata Kuliah Perpajakan
1.	3,26	2,33	2,63
2.	3,25	2,85	2,92
3.	3,30	2,90	3,00
4.	3,16	2,75	2,89
5.	3,04	2,88	2,95
7.	2,08	2,35	2,13
8.	2,51	2,45	2,56
9.	2,50	2,76	2,54
10.	1,75	2,07	1,89
11.	3,14	2,83	2,73
12.	2,20	2,41	2,43
13.	2,71	2,56	2,58
15.	2,37	2,60	2,39
16.	2,10	2,50	2,25
Rata-rata	2,67	2,59	2,56
Sistem Pajak	3,01	2,67	2,75
Keadilan Pajak	2,45	2,53	2,45
Diskriminasi	2,10	2,50	2,25

Sumber: Data primer, diolah (2020)

Berdasarkan tabel 4.9, diketahui bahwa responden wajib pajak memiliki nilai skor rata-rata 2,67, yang berarti responden wajib pajak masih ragu-ragu apakah penggelapan pajak merupakan hal yang etis atau tidak. Skor terendah adalah 1,75 pada pertanyaan nomor 10, yang artinya mereka sangat tidak setuju bahwa

penggelapan pajak merupakan hal yang etis meskipun orang lain juga melakukannya. Skor tertinggi adalah 3,30 pada pertanyaan nomor 3, yang artinya mereka masih ragu apakah penggelapan pajak merupakan hal yang etis jika sistem pajak berjalan dengan tidak efisien.

Responden mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah perpajakan memiliki nilai skor rata-rata 2,59, yang berarti responden mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah perpajakan tidak setuju bahwa penggelapan pajak adalah hal yang etis dengan berbagai alasan. Skor terendah adalah 2,07 pada pertanyaan nomor 10, yang artinya mereka tidak setuju bahwa penggelapan pajak merupakan hal yang etis meskipun orang lain juga melakukannya. Skor tertinggi adalah 2,90 pada pertanyaan nomor 3, yang artinya mereka masih ragu apakah penggelapan pajak merupakan hal yang etis jika sistem pajak berjalan dengan tidak efisien.

Responden mahasiswa yang belum mengambil mata kuliah perpajakan memiliki nilai skor rata-rata 2,56, yang berarti responden mahasiswa yang belum mengambil mata kuliah perpajakan tidak setuju bahwa penggelapan pajak adalah hal yang etis dengan berbagai alasan. Skor terendah adalah 1,89 pada pertanyaan nomor 10, yang artinya mereka tidak setuju bahwa penggelapan pajak merupakan hal yang etis meskipun orang lain juga melakukannya. Skor tertinggi adalah 2,95 pada pertanyaan nomor 5, yang artinya mereka masih ragu apakah penggelapan pajak merupakan hal yang etis jika sebagian besar porsi dari pajak yang dikumpulkan dipergunakan secara tidak merata.

a) Persepsi Etika Penggelapan Pajak Pada Variabel Sistem Pajak

Jawaban responden atas pertanyaan yang terkait dengan variabel sistem pajak secara ringkas tersaji pada tabel 4.9. Dari tiga kategori responden, masing-masing responden memiliki skor 3,01 untuk wajib pajak, 2,67 untuk mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah perpajakan, dan 2,75 untuk mahasiswa yang belum mengambil mata kuliah perpajakan. Hal ini berarti rata-rata responden masih ragu dengan penggelapan pajak apakah etis atau tidak untuk dilakukan walaupun negara tidak memiliki sistem pajak yang baik. Keraguan tersebut dapat disebabkan jika semakin baik sistem pajak yang ada maka belum tentu perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak etis, sebaliknya semakin tidak baik sistem pajak yang ada maka belum tentu perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang cenderung etis (Mentari dan Halimatusyadiah, 2017).

b) Persepsi Etika Penggelapan Pajak Pada Variabel Keadilan Pajak

Jawaban responden atas pertanyaan yang terkait dengan variabel keadilan pajak secara ringkas tersaji pada tabel 4.9. Dari tiga kategori responden, masing-masing responden memiliki skor 2,45 untuk wajib pajak, 2,53 untuk mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah perpajakan, dan 2,45 untuk mahasiswa yang belum mengambil mata kuliah perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kategori responden sama-sama tidak setuju bahwa tindakan penggelapan pajak adalah etis walaupun pelaksanaan keadilan dalam perpajakan tidak berjalan dengan

baik. Karena pajak merupakan kewajiban bagi seluruh warga negara maka responden tidak setuju dengan adanya tindakan penggelapan pajak walaupun penggunaan uang yang bersumber dari pajak digunakan secara adil atau tidak (Mujiyati *et al.*, 2018).

c) Persepsi Etika Penggelapan Pajak Pada Variabel Diskriminasi

Jawaban responden atas pertanyaan yang terkait dengan variabel diskriminasi secara ringkas tersaji pada tabel 4.9. Dari tiga kategori responden, masing-masing responden memiliki skor 2,10 untuk wajib pajak, 2,50 untuk mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah perpajakan, dan 2,25 untuk mahasiswa yang belum mengambil mata kuliah perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kategori responden sama-sama tidak setuju bahwa tindakan penggelapan pajak adalah etis walaupun terdapat diskriminasi dalam pelaksanaan perpajakan. Setinggi apapun tingkat diskriminasi yang terjadi, penggelapan pajak tetap tidak etis untuk dilakukan.

3) Uji Hipotesis

Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji *Kruskal Wallis Test* karena data berdistribusi tidak normal dengan menggunakan program SPSS 20.00. Uji beda ini digunakan untuk menguji perbedaan persepsi calon wajib pajak yang terdiri dari mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah perpajakan dan mahasiswa yang belum mengambil mata kuliah perpajakan dengan wajib pajak orang pribadi. Adapun hasil analisis uji *Kruskal Wallis Test* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.19 Hasil Uji *Kruskal Wallis Test*

	Etika Penggelapan Pajak
Chi Square	1,351
df	2
Asymp. Sig.	0,509

Sumber: Data primer, diolah (2020)

Berdasarkan tabel 4.19, dapat dilihat bahwa nilai *Chi-Square* (H hitung) sebesar 1,351 sedangkan nilai *Chi-Square* tabel dengan $df = (\alpha; k - 1)$ atau 0,05;2 sebesar 5,991. Karena nilai H hitung $(1,351) \leq 5,991$ atau nilai Sig $(0,509) > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah perpajakan, mahasiswa yang belum mengambil mata kuliah perpajakan, dan wajib pajak orang pribadi terhadap etika penggelapan pajak.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah perpajakan, mahasiswa yang belum mengambil mata kuliah perpajakan, dan wajib pajak orang pribadi terhadap etika penggelapan pajak. Hal ini dibuktikan oleh uji *Kruskal Wallis Test* dengan nilai H hitung $(1,351) \leq 5,991$ atau nilai Sig $(0,509) > 0,05$. Hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suwardi dan Abdurrasyid (2010) yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara persepsi etis aparat pajak dan mahasiswa terhadap nilai etika di bidang perpajakan. Meskipun tidak mendukung penelitian sebelumnya, hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Putri (2015) yang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan

persepsi antara mahasiswa akuntansi dan wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diartikan bahwa persepsi responden terhadap etika penggelapan pajak didasari oleh faktor situasi. Ketiga kelompok responden menganggap bahwa tindakan penggelapan pajak tidak etis untuk dilakukan. Hal ini disebabkan karena adanya perkembangan teknologi dan inovasi yang diberikan oleh pemerintah yang akan memudahkan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga tidak ada lagi alasan untuk melakukan tindakan penggelapan pajak (Sasmito, 2017). Selain perkembangan teknologi dan inovasi, alasan responden untuk tidak melakukan tindakan penggelapan pajak juga disebabkan dengan tingkat *religiusitas*. Semakin tinggi tingkat *religiusitas* seseorang maka akan menimbulkan persepsi yang positif sehingga seseorang akan sadar pentingnya etika dan tidak akan melakukan tindakan penggelapan pajak (Shofa dan Utomo, 2018).

ANALISIS TAMBAHAN

Analisis tambahan digunakan untuk menguji perbedaan persepsi antara wajib pajak dengan sistem pemungutan pajak *self assessment system* dan wajib pajak dengan sistem pemungutan pajak *official assessment system*. Adapun hasil analisis SPSS dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.20 Hasil Uji *Kruskal Wallis Test* untuk Analisis Tambahan

	Etika Penggelapan Pajak
Chi Square	16,514
df	1
Asymp. Sig.	0,000

Sumber: Data primer, diolah (2020)

Berdasarkan tabel 4.20, dapat dilihat bahwa nilai *Chi-Square* (H hitung) sebesar 16,514 sedangkan nilai *Chi-Square* tabel dengan $df = (\alpha; k - 1)$ atau 0,05;1 sebesar 3,841. Karena nilai H hitung (16,514) > 3,841 atau nilai Sig (0,000) < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan persepsi antara wajib pajak dengan sistem pemungutan pajak *self assessment system* dan wajib pajak dengan sistem pemungutan pajak *official assessment system*.

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis statistik deskriptif, dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - a. Dilihat dari variabel sistem perpajakan, wajib pajak, mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah perpajakan, dan mahasiswa yang belum mengambil mata kuliah perpajakan masih ragu dengan tindakan penggelapan pajak apakah etis atau tidak untuk dilakukan.
 - b. Dilihat dari variabel keadilan perpajakan, wajib pajak, mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah perpajakan, dan mahasiswa yang belum mengambil mata kuliah perpajakan sama-sama tidak setuju bahwa tindakan penggelapan pajak adalah hal yang etis.
 - c. Dilihat dari variabel diskriminasi, wajib pajak, mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah perpajakan, dan mahasiswa yang belum mengambil mata kuliah perpajakan juga sama-sama tidak setuju bahwa tindakan penggelapan pajak adalah hal yang etis.

2. Berdasarkan hasil uji *Kruskall Wallis Test* dapat dilihat bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah perpajakan, mahasiswa yang belum mengambil mata kuliah perpajakan, dan wajib pajak orang pribadi terhadap etika penggelapan pajak.

b. Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah peneliti menggunakan metode penyebaran kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Sehingga adanya kemungkinan responden tidak serius, tidak teliti, dan tidak jujur dalam memberikan jawaban.

c. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan penelitian, maka peneliti memberikan saran yaitu diharapkan untuk penelitian selanjutnya tidak hanya menggunakan kuesioner tetapi juga melakukan wawancara secara langsung agar hasil jawabannya lebih terpercaya dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrahams, N. B., & Kristanto, A. B. (2016). Persepsi Calon Wajib Pajak Dan Wajib Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak di Salatiga. *Jurnal Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 50–70. <https://doi.org/10.1055/s-2006-961412>
- Algifari. (2018). *Statistika Deskriptif Plus Untuk Ekonomi Dan Bisnis* (2 ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Aprianto, A., Wijaya, A., & Budi, K. (2007). Sukanto Tanoto Tersangka Penggelapan Pajak. *Tempo*. Diambil dari <https://antikorupsi.org/en/news/sukanto-tanoto-tersangka-penggelapan-pajak>
- Diskriminasi*. (n.d.). Diambil dari <https://kbbi.web.id/diskriminasi>

- Faradiza, S. A. (2018). Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Akuntabilitas*, 11(1), 53–74. <https://doi.org/10.15408/akt.v11i1.8820>
- Fungsi-pajak*. (n.d.). Diambil dari <https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ika. (2012). *kepala kppp wonosari raih doktor usai teliti penggelapan pajak transaksi properti*. Diambil dari <https://www.ugm.ac.id/id/berita/4151-kepala-kppp-wonosari-raih-doktor-usai-teliti-penggelapan-pajak-transaksi-properti>
- Ira. (2018). Kanwil Ditjen Pajak DIY Kejar Target. *krjogja*. Diambil dari https://krjogja.com/web/news/read/87297/Kanwil_Ditjen_Pajak_DIY_Kejar_Target
- Ira. (2019). Realisasi Penerimaan Pajak DIY Baru 55,83 Persen. *krjogja*. Diambil dari https://krjogja.com/web/news/read/111194/Realisasi_Penerimaan_Pajak_DIY_Baru_55_83_Persen
- Keraf, S. (1998). *Etika Bisnis Tuntutan Dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kurniawati, M., & Toly, A. A. (2014). Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Tarif Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak di Surabaya Barat. *Tax & Accounting Review*, 4(2), 1–12.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mentari, A., & Halimatusyadiah. (2017). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI ETIKA ATAS PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION)* (Universitas Bengkulu). Diambil dari [http://repository.unib.ac.id/11799/1/SKRIPSI .pdf](http://repository.unib.ac.id/11799/1/SKRIPSI.pdf)
- Mujiyati, M., Rohmawati, F. R., & Ririn, W. H. (2018). Determinan Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v3i1.5551>
- Paramita, M., & Budiasih, I. (2016). Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, Dan Teknologi Perpajakan Pada Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 17(2), 1030–1056.
- Penggelapan Pajak tak tergarap.pdf. (2013). *Kompas*. Diambil dari <http://www.pajakonline.com/engine/artikel/art.php?artid=9773>

- Persepsi*. (n.d.). Diambil dari <https://kbbi.web.id/persepsi>
- Prasetyo, S. (2010). *Persepsi Etis Penggelapan Pajak Bagi Wajib Pajak di Wilayah Surakarta. Tesis*.
- Priyatno, D. (2014). *SPSS 22 Pengolahan Data Terpraktis*. Yogyakarta: Andi.
- Putri, A. M. G. A. (2015). *Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi dan Wajib Pajak Kotamadya Surakarta)*. Diambil dari <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/51352/Persepsi-Mengenai-Etika-Atas-Penggelapan-Pajak-Tax-Evasion-Studi-Pada-Mahasiswa-Jurusan-Akuntansi-dan-Wajib-Pajak-Kotamadya-Surakarta>
- Reskino, Rini, R., & Novitasari, D. (2014). Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak. *InFestasi*, 10(1), 49–63. Diambil dari <https://infestasi.trunojoyo.ac.id/infestasi/article/view/511/479>
- Saraswati, B. D. (2017). Kesadaran Perpajakan Warga Jogja Perlu Ditingkatkan. *HarianJogja*. Diambil dari <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2017/05/19/510/818030/kesadaran-perpajakan-warga-jogja-perlu-ditingkatkan>
- Sarjono, H., & Julianita, W. (2013). *SPSS vs LISREL: Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sasmito, G. G. (2017). Pengaruh tarif pajak, keadilan sistem perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan terhadap penggelapan pajak. *STIE Perbanas Surabaya*, 1–19.
- Abrahams, N. B., & Kristanto, A. B. (2016). Persepsi Calon Wajib Pajak Dan Wajib Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak di Salatiga. *Jurnal Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 50–70. <https://doi.org/10.1055/s-2006-961412>
- Algifari. (2018). *Statistika Deskriptif Plus Untuk Ekonomi Dan Bisnis* (2 ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Aprianto, A., Wijaya, A., & Budi, K. (2007). Sukanto Tanoto Tersangka Penggelapan Pajak. *Tempo*. Diambil dari <https://antikorupsi.org/en/news/sukanto-tanoto-tersangka-penggelapan-pajak>
- Diskriminasi*. (n.d.). Diambil dari <https://kbbi.web.id/diskriminasi>
- Faradiza, S. A. (2018). Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Akuntabilitas*, 11(1), 53–74. <https://doi.org/10.15408/akt.v11i1.8820>

- Fungsi-pajak*. (n.d.). Diambil dari <https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ika. (2012). *kepala kppp wonosari raih doktor usai teliti penggelapan pajak transaksi properti*. Diambil dari <https://www.ugm.ac.id/id/berita/4151-kepala-kppp-wonosari-raih-doktor-usai-teliti-penggelapan-pajak-transaksi-properti>
- Ira. (2018). Kanwil Ditjen Pajak DIY Kejar Target. *krjogja*. Diambil dari https://krjogja.com/web/news/read/87297/Kanwil_Ditjen_Pajak_DIY_Kejar_Target
- Ira. (2019). Realisasi Penerimaan Pajak DIY Baru 55,83 Persen. *krjogja*. Diambil dari https://krjogja.com/web/news/read/111194/Realisasi_Penerimaan_Pajak_DIY_Baru_55_83_Persen
- Keraf, S. (1998). *Etika Bisnis Tuntutan Dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kurniawati, M., & Toly, A. A. (2014). Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Tarif Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak di Surabaya Barat. *Tax & Accounting Review*, 4(2), 1–12.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mentari, A., & Halimatusyadiah. (2017). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI ETIKA ATAS PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION)* (Universitas Bengkulu). Diambil dari [http://repository.unib.ac.id/11799/1/SKRIPSI .pdf](http://repository.unib.ac.id/11799/1/SKRIPSI.pdf)
- Mujiyati, M., Rohmawati, F. R., & Ririn, W. H. (2018). Determinan Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v3i1.5551>
- Paramita, M., & Budiasih, I. (2016). Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, Dan Teknologi Perpajakan Pada Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 17(2), 1030–1056.
- Penggelapan Pajak tak tergarap.pdf. (2013). *Kompas*. Diambil dari <http://www.pajakonline.com/engine/artikel/art.php?artid=9773>
- Persepsi*. (n.d.). Diambil dari <https://kbbi.web.id/persepsi>
- Prasetyo, S. (2010). Persepsi Etis Penggelapan Pajak Bagi Wajib Pajak di Wilayah

Surakarta. Tesis.

Priyatno, D. (2014). *SPSS 22 Pengolahan Data Terpraktis*. Yogyakarta: Andi.

Putri, A. M. G. A. (2015). *Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi dan Wajib Pajak Kotamadya Surakarta)*. Diambil dari <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/51352/Persepsi-Mengenai-Etika-Atas-Penggelapan-Pajak-Tax-Evasion-Studi-Pada-Mahasiswa-Jurusan-Akuntansi-dan-Wajib-Pajak-Kotamadya-Surakarta>

Reskino, Rini, R., & Novitasari, D. (2014). Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak. *InFestasi*, 10(1), 49–63. Diambil dari <http://infestasi.trunojoyo.ac.id/infestasi/article/view/511/479>

Saraswati, B. D. (2017). Kesadaran Perpajakan Warga Jogja Perlu Ditingkatkan. *HarianJogja*. Diambil dari <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2017/05/19/510/818030/kesadaran-perpajakan-warga-jogja-perlu-ditingkatkan>

Sarjono, H., & Julianita, W. (2013). *SPSS vs LISREL: Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset*. Jakarta: Salemba Empat.

Sasmito, G. G. (2017). Pengaruh tarif pajak, keadilan sistem perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan terhadap penggelapan pajak. *STIE Perbanas Surabaya*, 1–19.

Sekarani, R. (2017). ini-dia-hasil-penerimaan-pajak-di-diy-sepanjang-2017. *HarianJogja*. Diambil dari <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2018/01/03/512/881597/ini-dia-hasil-penerimaan-pajak-di-diy-sepanjang-2017>

Shofa, D., & Utomo, S. D. (2018). Keterkaitan religiusitas , gender , lom dan persepsi etika penggelapan pajak. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 9(2), 43–61.

Siregar, S. (2012). *Statistika Deskriptif Untuk Penelitian Dilengkapi Perhitungan Manual Dan Aplikasi SPSS VERSI 17*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Soemitro, R., & Sugiharti, D. K. (2010). *Asas dan Dasar Perpajakan 1*. Bandung: Refika Aditama.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, V. W., & Endrayanto, P. (2012). *STATISTIKA UNTUK PENELITIAN*

(Pertama). Yogyakarta: Graha Ilmu.

Suminarsasi, W. S. (2011). Terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion). *SNA 15 Banjarmasin*, 0–29.

Suwardi, E., & Abdurrasyid, M. (2010). Persepsi Etis Aparat Pajak dan Mahasiswa : Studi Empiris pada Pemeriksa Pajak , Account Representative dan Mahasiswa Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. *BPPK, I(1)*, 2–30. Diambil dari <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/jurnalbppk/article/view/4>

Utami, T. G., & Widodo, A. (2015). Jurnal Akuntansi dan Bisnis. *Persepsi Mahasiswa Akuntansi dan Mahasiswa Hukum Terhadap Etika Penggelapan Pajak, 15(2)*, 96–105.

Wicaksono, K. A. (2014). Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion): Perbedaan Persepsi Mahasiswa Ekonomi, Hukum, dan Psikologi. *Skripsi*. Diambil dari http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=70328

Wajib-pajak-dan-npwp. (n.d.). Diambil dari <https://www.pajak.go.id/id/wajib-pajak-dan-npwp>

Zain, M. (2008). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.